

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Keterlibatan Perempuan dalam Ekonomi

2.1.1.1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Watora (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan perempuan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak perempuan dalam meningkatkan potensi diri. Peran serta perempuan dalam perekonomian merupakan fenomena yang berlangsung sejak lama dan telah memasuki kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan (2021) menjelaskan bahwa peran dan kontribusi perempuan merupakan faktor utama dalam menghadapi tantangan yang ada seiring berjalannya transformasi ekonomi. Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan untuk meningkatkan mutu partisipasi perempuan dalam perekonomian. Banyak perempuan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dengan bekerja di berbagai macam bidang seperti bekerja di instansi publik, bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, perikanan, sektor jasa dan bidang lainnya.

World Economic Forum (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu kunci dari kenaikan pendapatan nasional suatu negara dan dapat mempengaruhi kemajuan negara. Untuk mendukung pernyataan tersebut, dilansir dari BPS Indonesia, penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,42 persen per tahun 2020 yang artinya perempuan mempunyai peluang untuk

memajukan bangsa apabila diberdayakan dengan baik dan tepat. Ketersediaan perempuan untuk ikut serta menjadi bagian dari perekonomian dilandaskan pula akan keterbukaan dalam menerima pendidikan yang ada. Endang *dalam* Puspitasari (2012) menyatakan bahwa perempuan memiliki fungsi produksi yang melekat dalam kehidupannya. Fungsi produksi memiliki keterkaitan dengan fungsi ekonomi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan maka baik secara langsung ataupun tidak langsung kaum perempuan sudah menjadi pelaku pembangunan sesuai kemampuannya sebagai faktor produksi.

Perempuan mempunyai potensi yang besar dalam ekonomi sehingga perlu upaya pemberdayaan yang tepat. Törnqvist (2009) memberikan definisi bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan proses peningkatan kekuatan nyata perempuan atas keputusan ekonomi yang dapat membawa pengaruh kepada kehidupan dan prioritas perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan adalah pemberian akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan peluang ekonomi, menghapus ketidaksetaraan gender dalam pasar tenaga kerja. Pemberdayaan ekonomi perempuan akan lebih efektif apabila perempuan menikmati segala hak perempuan dan memiliki kemampuan dalam mengelola risiko dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari setiap individu perempuan terkait.

Pemberdayaan ekonomi perempuan mampu memberi ruang untuk perempuan agar bertanggungjawab atas hidup dan keluarganya dalam jangka panjang tanpa mengesampingkan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga.

Upaya pemberdayaan perempuan dalam perekonomian dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti program peningkatan akses perempuan akan informasi terkait sumber daya alam, pembangunan literasi digital bagi pengusaha perempuan mengenai keterampilan dalam berbisnis, dan berbagai hal lainnya.

2.1.1.2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan dijabarkan sebagai berikut (Novian *dalam* Watora, 2021: 28):

- 1) Untuk meningkatkan peran dan kondisi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
- 2) Untuk mempertahankan nilai persatuan dan solidaritas dalam rangka meningkatkan kualitas peran independen organisasi perempuan.
- 3) Untuk meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mencapai kesetaraan gender.
- 4) Untuk membangun dan mengembangkan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta perlindungan anak.
- 5) Meningkatkan komitmen yang setara dari semua lembaga untuk memperjuangkan keadilan gender.

2.1.1.3. Unsur-unsur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Mayoux *dalam* Watora (2021) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor utama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu:

1) Kesejahteraan

Perlu adanya pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan hak yang setara bagi kaum perempuan. Kesetaraan tersebut akan melahirkan adanya kesejahteraan dan berdampak akan adanya kemampuan dalam mengendalikan lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi.

2) Akses

Perlu adanya peluang atau kemampuan bagi perempuan dalam memperoleh hak atau akses akan adanya sumber daya produktif seperti tanah, pembinaan, fasilitas kredit, pemasaran, pekerjaan dan pelayanan publik yang sifatnya setara, baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki.

3) Konsientisasi

Pemahaman akan perbedaan peran masing-masing gender.

4) Partisipasi

Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam setiap pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, perencanaan dan manajemen.

5) Kesetaraan dalam Kekuasaan

Perempuan dan laki-laki memiliki keuntungan dan kekuatan yang sama.

2.1.1.4. Indikator Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi

Terdapat berbagai indikator dalam melihat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mewakili pemberdayaan perempuan dalam ekonomi adalah rasio perempuan sebagai tenaga profesional dan rasio perempuan yang menduduki posisi manajerial. Berikut

pengertian dari kedua macam golongan pokok tersebut menurut Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002:

1) Tenaga Profesional

Tenaga profesional merupakan golongan pokok yang tugas utamanya membutuhkan pengetahuan, pekerjaan yang kompleks dan pengalaman profesional dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan hayati, atau ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, tenaga profesional perlu mengembangkan dan menerapkan konsep ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menyiapkan dan mengajar materi secara sistematis. Pekerjaan yang masuk ke dalam golongan ini meliputi: peneliti ilmu pengetahuan alam, matematika dan teknik, peneliti ilmu pengetahuan hayati dan kesehatan, peneliti ilmu pengetahuan sosial dan peneliti lain YBDI, pengajar, ahli hukum, ahli usaha dan tenaga profesional lainnya.

2) Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer

Tenaga kerja yang ada dalam golongan pokok ini memiliki tugas untuk membuat keputusan, merumuskan, mengarahkan dan memberi saran mengenai kebijakan pemerintah dan kebijakan organisasi tertentu. Pekerjaan yang masuk ke dalam golongan pokok ini meliputi: pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, manajer perusahaan dan manajer umum.

2.1.2. Keterlibatan Perempuan dalam Politik

2.1.2.1. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik

Aritonang dalam Watora (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam meraih akses serta menjadi bagian dari pengambil keputusan. Femmy Eka Kartika Putri selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa dengan adanya pemberdayaan perempuan di bidang politik maka pengambilan keputusan politik akan menjadi lebih akomodatif dan substansial. Adanya keterlibatan perempuan dalam politik akan membantu mempercepat terwujudnya keteradilan gender yang asalnya dari perempuan sebagai pembuat kebijakan.

Oktapiani *et al.* (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik adalah suatu kemampuan atau cara suatu partai politik dalam mencapai kesetaraan dalam penempatan posisi perempuan dengan laki-laki melalui reformasi hukum yang berlaku dalam partai, pembentukan divisi perempuan, peraturan internal yang berlaku dalam partai dan strategi yang diberikan kepada perempuan saat masa pemilihan umum. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik tercermin pada bagaimana partai memperlakukan dan mengembangkan potensi anggota perempuan yang ada dalam partai tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik adalah hal yang penting dalam rangka tercapainya suara, kepentingan

dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan dalam politik dilakukan untuk membantu perempuan berani bergerak dalam bidang politik. Upaya pemberdayaan perempuan dalam politik dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan program secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan dan melakukan penyesuaian program pemberdayaan perempuan dengan kebutuhan kaum perempuan yang ada di berbagai sektor.

2.1.2.2. Indikator Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Politik

Terdapat berbagai indikator dalam menentukan kontribusi dalam politik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mewakili pemberdayaan perempuan dalam politik adalah rasio keterlibatan perempuan dalam parlemen. Umagapi (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukan merupakan hal baru. Dahulu para tokoh perempuan memperjuangkan pendidikan perempuan supaya setara dengan laki-laki dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang para perempuan dituntut untuk memberikan gagasan dan tenaga serta berperan aktif dalam pembangunan dalam berbagai bidang, baik bidang politik, sosial dan budaya.

Afrida (2019) menjelaskan bahwa berdasarkan UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat kesepakatan bahwa kuota keterwakilan perempuan di badan legislatif sebesar 30%. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon legislatif pemilu dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Aturan yang ada dapat menjelaskan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini sudah memberi ruang dan

doroangan terhadap keterlibatan perempuan dalam parlemen dan memberi dampak positif bagi kesetaraan gender.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhatikan besaran kenaikan PNB atau PDB dari tingkat pertumbuhan penduduk serta tidak memperhatikan perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan yang ada (Arsyad, 2016: 12). Selain itu pertumbuhan ekonomi sering digunakan oleh ahli ekonom untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju.

Wijono *dalam* Soleh (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Proses merujuk pada perkembangan perekonomian dari waktu yang berjalan secara dinamis, output per kapita merujuk pada keterkaitan antara aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk dan jangka panjang merujuk pada kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses perekonomian. Wijono *dalam* Soleh (2015) turut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan proses perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat selalu bertambah.

2.1.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2016) terdapat empat faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal dapat terjadi apabila ada pendapatan masa sekarang yang ditabung dan diinvestasikan untuk mendapatkan output yang lebih besar di masa yang akan datang. Semua jenis investasi dapat mendorong akumulasi modal yang positif dan akumulasi modal mampu menambah ketersediaan berbagai bentuk sumber daya baru atau menambah ketersediaan sumber daya yang sudah ada.

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dapat menjadi faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak jumlah angkatan kerja maka semakin banyak pasokan tenaga kerja. Di samping itu, semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merujuk pada cara/inovasi baru atau perbaikan dari cara-cara lama dalam melakukan pekerjaan tradisional. Kemajuan teknologi yang ada dapat membuat para pelaku ekonomi menghemat modal karena adanya pembagian kerja yang ringkas dengan tingkat output total yang lebih tinggi.

4) Sumber Daya Institusi (Sistem Kelembagaan)

Negara dengan institusi yang baik lebih memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan output perekonomian yang lebih baik. Selain itu, institusi yang baik dapat melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel serta mampu mengatasi segala bentuk permasalahan ekonomi.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Strategi tersebut diutamakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan harus memiliki dampak dalam kehidupan manusia serta aktif dalam mempengaruhi proses kehidupan manusia dalam segala aspek (Herkulana, 2020: 10). Untuk mengukur pembangunan manusia diperlukan sebuah indikator yaitu IPM.

Menurut UNDP *dalam* BPS (2018), IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Ukuran kualitas hidup yang dimaksud dalam IPM dibangun atas dasar pendekatan tiga dimensi yang mencakup:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standar hidup layak

Siswati dan Hermawati (2018) menjelaskan bahwa penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- 2) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- 3) Membentuk suatu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- 4) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Fretes (2017) menyatakan bahwa nilai IPM suatu negara atau wilayah mampu mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran serta konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Dengan adanya IPM, suatu negara atau wilayah dapat memberikan kebijakan yang tepat dan efisien. Badan Pusat Statistik turut menjelaskan bahwa IPM memiliki manfaat untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk suatu bangsa, untuk menentukan level pembangunan suatu negara/wilayah serta sebagai ukuran dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.2. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Tusianti (2021) adalah untuk mengidentifikasi pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan

politik serta kaitannya dengan peningkatan IPM perempuan di Indonesia pada tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menganalisis faktor pemberdayaan yang mampu mempengaruhi IPM perempuan di Indonesia. Selain itu terdapat analisis deskriptif untuk melihat peta sebaran IPM perempuan serta pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* dengan individu yaitu 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase pengusaha perempuan, persentase perempuan di parlemen, serta persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi. Sementara variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM perempuan di Indonesia. Tahun yang digunakan pada tiap variabel adalah tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas perempuan semakin baik setiap tahunnya bila dilihat dari IPG periode 2010-2017. Selain itu persentase perempuan sebagai pengusaha, persentase perempuan di parlemen, dan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Dalam penelitian tertulis bahwa perempuan memiliki sumber daya yang baik di aspek ekonomi dan politik akan berdampak baik pada kualitas perempuan Indonesia dan IPM Indonesia akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Oelietina (2020) adalah pengamatan variabel sosial teknologi informasi yang dianggap memiliki korelasi dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Alat ukur yang digunakan dalam penelitian adalah

korelasi *pearson* dengan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah IPM, IPG, persentase perempuan yang memiliki *Hand Phone*, persentase perempuan yang membaca media cetak dan elektronik, persentase perempuan yang menggunakan komputer dan persentase pengguna internet perempuan. Objek data yang dianalisa merupakan 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan tahun observasi yaitu tahun 2018. Data IPG dan IPM bersumber dari publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Badan Pusat Statistik 2018. Data IKG bersumber dari buku Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2). Selanjutnya data mengenai penggunaan teknologi dan informasi bersumber dari publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018 yang merupakan hasil olah SUSENAS 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat, negatif dan signifikan antara variabel sosial teknologi informasi dengan IKG.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bhakti *et al.* (2017) adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Indonesia pada tahun 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel dengan individu yaitu 33 provinsi di Indonesia. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rasio ketergantungan, dan konsumsi rumah tangga untuk makanan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan, dan APBD untuk kesehatan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil berupa adanya pengaruh positif dan signifikan dari PDRB dan APBD untuk kesehatan terhadap IPM, pengaruh negatif dan signifikan dari rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan, serta tidak ada pengaruh dari APBD

untuk pendidikan terhadap IPM. Penulis menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan IPM setiap tahunnya melalui pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengendalian populasi, pengentasan kemiskinan, dan adanya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat adanya korelasi yang kuat, negatif dan signifikan antara variabel sosial teknologi informasi dengan IKG yang artinya variabel sosial teknologi berpengaruh terhadap kesetaraan gender.

Amory (2019) melakukan penelitian untuk melihat peranan gender perempuan dalam pembangunan di Sulawesi Barat tahun 2016-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Penggunaan analisis deskriptif diperlukan untuk melakukan analisis terhadap peran Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP), Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) di Sulawesi Barat tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP) memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan kesadaran perempuan akan pentingnya hidup sehat yang meningkat. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) masih berada dibawah laki-laki. Salah satu pemicu terjadinya hal tersebut adalah pola investasi pendidikan di Indonesia yang terlalu mengesampingkan pentingnya pendidikan tingkat lanjut dalam kaitannya dengan keterampilan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Maulana dan Bowo (2013) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia Tahun 2007-2011. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pemicu adanya pengaruh tersebut antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya suatu infrastruktur dan mendorong pembangunan manusia. Namun untuk variabel teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM dan tidak memenuhi teori yang digunakan dalam penelitian ini.